



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul	: Cuma Ada 6 Dari 52 RUU Yang Disahkan, 2017, Tahun Kegelapan DPR
Tanggal	: Selasa, 26 Desember 2017
Surat Kabar	: Rakyat Merdeka
Halaman	: 11

Cuma Ada 6 Dari 52 RUU Yang Disahkan 2017, Tahun Kegelapan DPR

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mencatat, 2017 merupakan tahun yang 'gelap' bagi kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

SEJUMLAH masalah terjadi dari segi legislasi, anggaran, pengawasan, dan kelembagaan. Akibatnya kerja-kerja DPR kurang efektif dan kepercayaan publik terus memudar.

Peneliti Formappi bidang legislasi, Lucius Karus menyebutkan, pada 2017 kinerja DPR dalam proses legislasi sangat mengecewakan. Hal ini tampak dari jumlah RUU yang berhasil disahkan sepanjang tiga masa sidang DPR tahun 2017.

Sebagaimana diketahui, pada 2017 DPR hanya mampu mengesahkan enam dari 52 RUU Prolegnas Prioritas. Bahkan, sebanyak 17 RUU di antaranya masih dalam tahap penyusunan draf dan sisanya dalam tahap pembahasan di tingkat I serta harmonisasi.

"Paradigma DPR dalam legislasi selalu mengedepankan jumlah yang bombastis. Tetapi pada prosesnya DPR tersebut-seok untuk menyelesaikan," kata Lucius di Jakarta.

Pihaknya menilai, lambatnya proses legislasi karena Tatib DPR tidak memberi penerangan soal masa waktu pembahasan

tahun, hasil yang disahkan jadi UU sangat minim. DPR ini tidak bercermin diri," sebutnya.

Peneliti Formappi, I Made Leo Wiratma menuturkan, sepanjang 2017 kehadiran anggota DPR dalam sidang paripurna juga memiliki catatan negatif. Pihaknya mencatat, Fraksi Hanura memiliki tingkat kehadiran yang paling baik dibandingkan fraksi lainnya.

Sementara itu fraksi yang paling rendah tingkat kehadirannya dalam sidang paripurna yakni PKB. "Kemalasan anggota DPR untuk mengikuti sidang-sidang menjadi salah satu penyebab kinerja DPR tetap buruk," katanya.

Selain itu, fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) juga dipertanyakan. Leo mengingatkan, sepanjang tahun ini ada 10 kasus yang dilaporkan ke MKD. Empat diantaranya diduga dilakukan oleh pimpinan DPR, yakni Fadli Zon dan Fahri Hamzah (masing-masing 2 kali) dan Setya Novanto (satu kali).

"Namun dari keseluruhan kasus-kasus itu tak satu pun terselesaikan atau setidak-tidaknya tidak jelas penyelesaiannya. Ini menjadi bukti bahwa MKD sebetulnya mandul alias tidak berfungsi sesuai tujuan pendirinya," katanya. ■ osp